

**PERANAN SOETARDJO KARTOHADIKOESOEMO
DALAM *VOLKSRAAD* PADA MASA PERGERAKAN
NASIONAL TAHUN (1936-1938)**

(Sebuah Tinjauan Historis Sejarah Indonesia)

ARTIKEL



Oleh:

M Yusran Yusuf

12144400016

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

M YUSRAN YUSUF, Peranan Soetardjo Kartohadikoesoemo Dalam *Volksraad* pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1936-1938 (Sebuah Tinjauan Historis Sejarah Indonesia). Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Mei 2017

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peranan Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam *Volksraad* pada masa pergerakan nasional. Tepatnya pada tahun 1936 pada saat diajukannya Petisi Soetardjo, sampai dengan keputusan terhadap Petisi Soetardjo pada tahun 1938.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan sejarah yaitu, dengan metode studi literatur yang meliputi pengidentifikasian, penjelasan, penguraian secara sistematis dari sumber-sumber yang mengandung informasi dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan ini terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perjuangan Soetardjo Kartohadikoesoemo di forum Dewan Rakyat mencapai puncaknya pada saat diajukannya “Petisi Soetardjo” 15 Juli 1936. Akhirnya, pada tanggal 16 November 1938 datanglah keputusan dari Kerajaan Belanda Nomor 40 yang menyatakan bahwa Petisi Soetardjo di tolak oleh Ratu Belanda. Alasan penolakan adalah karena bangsa Indonesia dianggap belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah Indonesia sendiri. Surat keputusan pemerintah kerajaan Belanda tersebut disampaikan kepada sidang *Volksraad* pada tanggal 29 November 1938. Meskipun mengalami kekecewaan, tetapi Penolakan pemerintah terhadap Petisi Soetardjo telah menimbulkan pengaruh terhadap pergerakan nasional Indonesia yang antara lain adalah semakin menumbuhkan rasa solidaritas dan rasa persatuan diantara kaum pergerakan. Rasa persatuan yang semakin besar tersebut kemudian diwujudkan dengan pembentukan GAPI (Gabungan Politik Indonesia) pada tanggal 21 Mei 1939.

Kata Kunci: Soetardjo Kartohadikoesoemo, Petisi, *Volksraad*, Pergerakan Nasional

ABSTRACT

M YUSRAN YUSUF, The Role of Soetardjo Kartohadikoesoemo In *Volksraad* in the National Movement Period 1936-1938 (An Historical Overview of Indonesian History). **Thesis. Yogyakarta. The Faculty of Education Universitas PGRI Yogyakarta, May 2017**

This thesis aims to determine the role of Soetardjo Kartohadikoesoemo in the *Volksraad* during the national movement. Precisely in 1936 at the time of the filing by Soetardjo's Petition, until the decision on the Petition by Soetardjo's in 1938.

The methods that used in this thesis is method of history writing, named the method of literature that includes the identification, description, systematically decomposition from many sources that containing information relating of investigating matters. The steps undertaken in this thesis contained the heuristics, sources criticism, interpretation, and historiography.

The results of the research, Soetardjo Kartohadikoesoemo's struggle in the People's Council forum reached the limit in time to filing the Soetardjo's Petition July 15th 1936. On November 16th 1938, the decision of Kingdom of the Netherlands No. 40 is finally out, which states that the Soetardjo's Petition proposal is rejected by the Dutch Queen. The reason for rejection was because the Indonesian people considered immature to assume responsibility of Indonesian govern themselves. Dutch royal government decree was submitted to the *Volksraad* council session on November 29th 1938. Despite the disappointment of the Government's refusal to Soetardjo's Petition, it keep impacting on the Indonesian national movement, such as sense of solidarity and sense of unity among the movements, are significantly increased. Based on the sense of unity are greater on that time, then The Indonesian Political Federation (GAPI) is created and officially been formed on May 21st, 1939.

Keywords: Soetardjo Kartohadikoesoemo, Petition, *Volksraad*, National Movement

PENDAHULUAN

Pergerakan nasional merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Organisasi-organisasi pergerakan tersebut bergerak dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Hal tersebut menandakan bahwa pergerakan nasional bersifat multidimensional yang berarti meliputi segala bidang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pringgodigdo (1986:8), “Bahwa pergerakan nasional memiliki arti yang luas dan besarnya aspek yang meliputinya, tidak hanya berupa pergerakan yang bersifat perbaikan derajat dari aspek politik, akan tetapi juga menuju perbaikan aspek-aspek lain seperti perekonomian, kebudayaan, keagamaan, pendidikan, dan sebagainya”.

Pada umumnya kaum pergerakan nasional di Indonesia dalam hal taktik, sikap dan mencapai tujuan bersama dapat dibagi menjadi dua bagian yang berlawanan yaitu golongan revolusioner kontra evolusioner, atau golongan radikal kontra dengan golongan moderat, atau golongan koperasi kontra golongan non koperasi (Badri Yatim, 1999:23-24).

Non koperasi adalah taktik perjuangan atau cara mencapai tujuan dalam pergerakan nasional dengan tidak mau bekerjasama dengan penjajah. Sedangkan koperasi adalah taktik perjuangan atau cara mencapai tujuan pergerakan nasional dengan bekerjasama dengan pemerintah kolonial (Suhartoyo Hadjosatoto, 1985:22). Pada dasarnya tujuan kedua gerakan tersebut baik yang kooperatif maupun non kooperatif sama-sama memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang berbeda hanyalah cara dan taktik perjuangannya.

Tokoh-tokoh yang berjuang dengan cara kooperatif di antaranya adalah Soetardjo Kartohadikoesoemo, Soetomo dan Mohammad Husni Thamrin. Sedangkan tokoh-tokoh yang berjuang dengan cara non kooperatif di antaranya adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir dan Tan Malaka. Meskipun melalui cara dan taktik perjuangan yang berbeda, akan tetapi perjuangan para tokoh-tokoh tersebut baik yang melalui cara kooperatif ataupun non kooperatif sama-sama mempunyai peranan penting dan saling melengkapi satu dengan yang lain.

Perjuangan dalam mencapai kemerdekaan, baik yang melalui gerakan kooperatif maupun non kooperatif sama-sama memiliki konsekuensi masing-masing. Kelompok yang memiliki jalan non kooperatif kerap kali pergerakan mereka dipatahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan berbagai cara. Berbeda dengan kelompok yang memilih jalan kooperatif, kerap kali mereka mendapat konotasi negatif. Dengan berjuang di dalam sistem pemerintahan kolonial,

mereka seringkali dianggap sebagai kaki tangan Belanda. Kecurigaan tersebut tidak sepenuhnya salah, terdapat diantara mereka yang setia dan patuh kepada pemerintahan Hindia Belanda dengan sikap lebih Belanda daripada Belanda (Ruchiat, dkk, 2012:7).

Namun tidak semua demikian, sebagai tokoh kooperatif yang berjuang melalui dewan tersebut, Soetardjo Kartohadikoesoemo bukannya menjadi antek-antek Belanda yang dengan proaktif memperjuangkan kepentingan pribadinya dan kepentingan Pemerintah Hindia Belanda, melainkan malah mempunyai banyak kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

Salah satu usaha untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, yaitu mengajukan Petisi Soetardjo melalui *Volksraad* tanggal 15 Juli 1936. gagasan Petisi Soetardjo Kartohadikoesoemo yaitu agar diadakannya suatu konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan Nederland untuk merencanakan perubahan-perubahan yang dalam waktu sepuluh tahun dapat memberi status merdeka kepada Indonesia.

Hal tersebut menjadi kajian yang menarik bagi peneliti karena kesediaan Soetardjo Kartohadikoesoemo untuk bekerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda memungkinkan Soetardjo kartohadikoesoemo menjadi antek-antek Belanda yang setia patuh terhadap kekuasaan pemerintahan kolonial. Namun yang terjadi malah sebaliknya, Soetardjo Kartohadikoesoemo justru bersikap oposisi terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Dewan Rakyat yang dicurigai hanya akan memberikan keuntungan bagi pihak pemerintah kolonial digunakan Soetardjo Kartohadikoesoemo untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.

Dilihat dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam, serta mengangkatnya kedalam skripsi dengan mengambil judul “Peranan Soetardjo Kartohadikoesoemo Dalam *Volksraad* Pada Masa Pergerakan Nasional Tahun (1936-1938)“.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang dikemukakan diatas, rumusan masalah yang akan menjadi fokus utama peneliti ini adalah “Peranan Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam *Volksraad* pada masa pergerakan nasional tahun 1936-1938”. Untuk lebih mempermudah dan mengarahkan dalam pembahasan, maka rumusan masalah di atas harus dibatasi dengan batasan-batasan masalah. Adapun batasan-batasan masalah tersebut dituangkan ke dalam beberapa pertanyaan peneliti, diantaranya sebagai berikut: 1) Bagaimana latar belakang kehidupan Soetardjo Kartohadikoesoemo? 2) Bagaimana peranan Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam

Volksraad? 3) Bagaimana reaksi Pemerintahan Hindia Belanda terhadap perjuangan Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam *Volksraad*? 4) Bagaimana dampak perjuangan Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam *Volksraad* terhadap perkembangan pergerakan nasional?.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peranan Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam *Volksraad* pada masa pergerakan nasional tahun 1936-1938. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti yang telah diajukan, di antaranya sebagai berikut: 1) Mendeskripsikan latar belakang kehidupan Soetardjo Kartohadikoesoemo. 2) Mendeskripsikan peranan Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam *Volksraad*. 3) Menganalisis reaksi Pemerintahan Hindia Belanda terhadap perjuangan Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam *Volksraad*. 4) Menganalisis dampak perjuangan Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam *Volksraad* terhadap perkembangan pergerakan nasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan judul skripsi yang akan ditulis yaitu “Peranan Soetardjo Kartohadikoesoemo Dalam *Volksraad* Pada Masa Pergerakan Nasional Tahun (1936-1938)”. Penulis membatasi pada lingkup waktu, lingkup, tempat, dan lingkup permasalahan. Ruang lingkup waktu dibatasi yaitu pada tahun 1936-1938. Dimana masa perjuangan Soetardjo Kartohadikoesoemo mencapai puncaknya pada saat diajukannya “Petisi Soetardjo”. Lingkup tempat dalam skripsi ini adalah *Volksraad* pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan lingkup permasalahan dimulai dari latar belakang Soetardjo Kartohadikoesoemo dan diakhiri dengan dampak perjuangan Soetardjo Kartohadikoesoemo. Namun demikian tidak berarti dalam penulisan skripsi ini akan mengabaikan hal-hal yang terjadi sebelum bahkan sesudahnya, terlebih apabila hal-hal tersebut masih ada relevansinya dengan permasalahan atau bahkan dapat digunakan untuk memperjelas fakta-fakta yang ada hubungannya dengan judul tersebut.

Dalam membahas permasalahan ini, penulis akan meninjau permasalahan tersebut dari sudut pandang historis, sosial dan politik. Pembahasan dititik beratkan pada segi historis dan politik. Metode pendekatan historis adalah merupakan salah satu cabang ilmu yang meneliti atau menyelidiki secara sistematis yang merupakan keseluruhan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau. Dalam hal ini digunakan untuk menilai secara kritis keseluruhan penelitian dan penyelidikan suatu masalah yang terjadi. Guna melihat hasilnya kemudian dijadikan sebagai perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentu keadaan sekarang serta proses untuk

menuju masa yang akan datang (Ruslan Abdulgani, 1993:13). Pendekatan sosiologis membantu mengungkapkan unsur-unsur sosial dalam suatu deskripsi. Unsur-unsur tersebut antara lain berkaitan struktur sosial, system politik, jaringan interaksi, struktur organisasi dan sebagainya (Sartono Kartodirjo, 1999:150). Untuk mempermudah proses penelitian, penulis menggunakan langkah-langkah sebagaimana yang diungkapkan oleh Dudung Abdurahman (2007:63), diantaranya yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, historiografi.

Pengumpulan Sumber (Heuristik), sebelum melakukan pencarian dan pengumpulan sumber sejarah, langkah yang dilakukan adalah menentukan tema atau topik penelitian. Dalam skripsi ini, penulis mengambil topik tentang Dewan Rakyat (*Volksraad*), yang kemudian lebih difokuskan pada peranan salah seorang anggota *Volksraad* pada masa pergerakan nasional yaitu Soetardjo Kartohadikoesoemo. Setelah mendapatkan topik penelitian, tahap berikutnya adalah mengumpulkan sumber (Heuristik). Tahap ini merupakan proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Menurut Sartono Kartodirjo (1997:83), sumber sejarah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan suatu karya sejarah. Sumber merupakan pangkal tolak dari suatu rekonstruksi sesuatu yang akan dibangun. Sumber ini juga dapat diistilahkan sebagai model rekayasa konstruksi sejarah karena dari sumber dapat ditarik suatu fakta sejarah yang kemudian menjadi dasar usaha menghidupkan peristiwa masa lampau. Pada tahap ini, penulis mencari dan mengumpulkan berbagai sumber yang dianggap relevan dengan pokok kajian yang akan ditulis. Terkait dengan teknik penelitian yang digunakan, yaitu studi literatur, maka sumber yang digunakan berbentuk tulisan, baik itu buku, ensiklopedia dan artikel yang penulis temukan pada jurnal atau internet. Kegiatan yang penulis lakukan adalah mendatangi perpustakaan dan tempat lain yang menyediakan buku-buku sumber yang dibutuhkan. Dalam tahap ini penulis mengunjungi perpustakaan UPY dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. Selain itu, penulis juga menelaah dan mengambil data dari sumber internet.

Kritik Sumber (Verifikasi), data-data yang diperoleh dari sumber sejarah, tidak langsung dituangkan ke dalam sebuah tulisan menjadi karya baru, melainkan dilakukan kritik terhadap sumber terlebih dahulu. Dalam tahap ini, penulis melakukan kritik terhadap sumber yang digunakan, yaitu buku-buku berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Menurut Dudung Abdurahman (2007:63), untuk memperoleh keabsahan sumber maka dilakukan kritik ekstern dengan langkah menguji sumber-sumber itu merupakan jejak sejarah yang bisa

dipertanggungjawabkan, dan kritik intern dengan langkah melihat kebenaran informasi dari penulis dan kemampuannya dalam menyatakan sesuatu dengan tepat berdasarkan pada sumber-sumber autentik lainnya.

Interpretasi, interpretasi merupakan sebuah proses dari penafsiran sumber-sumber sejarah. menurut Kuntowijoyo (1995:100) dalam buku Dudung Abdurahman (2007:73) ada dua metode yang digunakan dalam interpretasi yaitu : analisis yang artinya menguraikan dan sintesis yang artinya menyatukan. Dalam penulisan skripsi ini telah dilakukan kritik sumber, maka sumber tersebut dianalisis secara teliti untuk mendapatkan data-data yang lebih spesifik, relevan dan terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya dan disintesis agar memperoleh hubungan antara data yang satu dengan yang lain.

Penulisan Sejarah (Historiografi), setelah melakukan proses analisis terhadap fakta-fakta yang ada, peneliti kemudian menyajikannya dalam bentuk tulisan yang disebut historiografi. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan dari awal hingga akhir (Dudung Abdurahman. 2007:76). Setelah langkah-langkah sebelumnya dilakukan maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu historiografi atau sering disebut dengan penyusunan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis berupa skripsi sejarah.

HASIL PENELITIAN

Soetardjo Kartohadikoesoemo lahir di Kunduran, Blora, 22 Oktober 1892. Adalah putra seorang Assistant-Wedono di onder-distrik Kunduran, Ngawi, yaitu Kiai Ngabehi Kartoredjo. Sedangkan Ibunda Soetardjo, Mas Ajoë Kartoredjo, adalah keturunan keluarga pemerintahan dari Banten. Keluarga Soetardjo adalah keluarga pamong praja. Semua saudara laki-lakinya menjadi pegawai negeri, sedangkan yang perempuan menjadi istri pegawai negeri. Walaupun berasal dari keluarga pegawai pemerintahan yang terpandang, masa kecil Soetardjo banyak dilalui bersama masyarakat desa (samita. 2012, hlm 1).

Dalam hal memperjuangkan bangsa Indonesia, Soetardjo Kartohadikoesoemo memakai taktik kooperatif yaitu dengan bekerjasama pemerintahan Hindia Belanda. Di Dewan Rakyat ("*Volksraad*"), Soetardjo Kartohadikoesoemo menjadi anggota yang merangkap sebagai wakil ketua fraksi pamong praja. Sebagai seorang pamong praja, Soetardjo Kartohadikoesoemo terlatih untuk bertindak di atas rel hukum yang berlaku.

Dalam *Volksraad* Soetardjo Kartohadikoesoemo dan kawan-kawan menuntut perbaikan dengan memajukan mosi baik dalam bidang perekonomian, dalam bidang pertahanan, dalam bidang pengajaran, dalam bidang desentralisasi, dalam bidang pedesaan dan dalam bidang pengadilan berdasarkan agama.

Zaman malaise terjadi ketika masa pemerintahan Gubernur Jenderal de Jonge. Pemerintahannya reaksioner, kejam, dan tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengeluarkan pendapat. Dalam keadaan seperti itu, pergerakan rakyat mengalami kebekuan. Banyak pemimpin nasionalis yang dianggap berbahaya ditangkap, dipenjara, atau dibuang, sehingga mereka terisolasi dan tidak dapat berhubungan dengan organisasi maupun massa pendukungnya. (Lapian, Dewi Juliati, dkk. 2012:409).

Dalam keadaan demikian, maka Soetardjo Kartohadikoesoemo berpikir terus berpikir untuk mencari jalan dengan dukungan pamong praja agar dapat membantu bangsa ini. Kemudian Soetardjo Kartohadikoesoemo mendapat pikiran, bahwa bagi seorang pamong praja setiap aksi yang dapat dibenarkan oleh umum, apabila didasarkan atas hukum. Soetardjo Kartohadikoesoemo berinisiatif untuk mengajukan sebuah usul kepada pemerintah kolonial yang didasarkan pada artikel 1 dalam *Grondwet Voor Het Koninkrijk Der Nederlanden*. Yang dinamakan Petisi Soetardjo.

Perjuangan Soetardjo Kartohadikoesoemo di forum Dewan Rakyat mencapai puncaknya pada saat diajukannya “Petisi Soetardjo” dengan mengajukan Petisi Soetardjo pada sidang *Volksraad* yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 1936. Tanpa pemilihan suara dalam *Volksraad*, Petisi Soetardjo akhirnya diterima untuk dibicarakan dalam sidang khusus. Sidang khusus untuk membicarakan Petisi Soetardjo dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 29 September 1936. Hasil dari sidang khusus tersebut adalah 26 orang anggota *Volksraad* menyetujui Petisi Soetardjo dan 20 orang lainnya menolak. Dengan begitu berarti Petisi Soetardjo telah menjadi Petisi *Volksraad*. Pada tanggal 1 Oktober 1936, Petisi Soetardjo kemudian dikirimkan pada Ratu, Staten General, dan Menteri Jajahan di negeri Belanda. Sambil menunggu keputusan disetujui atau ditolaknya Petisi Soetardjo, maka dibentuklah *Central Comite* Petisi Soetardjo baik di Indonesia maupun di Belanda. Sedangkan di daerah-daerah, dibentuk *Sub-sub Comite* Petisi Soetardjo. Dengan bantuan dari pers-pers nasional, *Central Comite* Petisi Soetardjo maupun *Sub-sub Comite* Petisi Soetardjo baik di Nederland maupun di Indonesia selalu melakukan

kampanye-kampanye atau propaganda-propaganda untuk mengumpulkan pendukung Petisi Soetardjo.

Akhirnya pada tanggal 16 November 1938 datanglah keputusan dari Kerajaan Belanda Nomor 40 yang menyatakan bahwa Petisi Soetardjo ditolak oleh Ratu Belanda. Alasan penolakan adalah karena bangsa Indonesia dianggap belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah Indonesia sendiri. Surat keputusan pemerintah kerajaan Belanda tersebut disampaikan kepada sidang *Volksraad* pada tanggal 29 November 1938.

Meskipun mengalami kekecewaan tetapi Penolakan pemerintah terhadap Petisi Soetardjo telah menimbulkan pengaruh terhadap pergerakan nasional Indonesia yang antara lain adalah semakin menumbuhkan rasa solidaritas dan rasa persatuan diantara kaum pergerakan. Rasa persatuan yang semakin besar tersebut kemudian diwujudkan dengan pembentukan GAPI (Gabungan Politik Indonesia) pada tanggal 21 Mei 1939.

KESIMPULAN

Historis, Soetardjo Kartohadikoesoemo lahir di Kunduran, Blora, 22 Oktober 1892. Adalah putra seorang *Assistant-Wedono* di *onder-distrik* Kunduran, Ngawi, yaitu Kiai Ngabehi Kartoredjo. Sedangkan Ibunda Soetardjo, Mas Ajoe Kartoredjo, adalah keturunan keluarga pemerintahan dari Banten. Keluarga Soetardjo adalah keluarga pamong praja .

Dalam hal memperjuangkan bangsa Indonesia, Soetardjo Kartohadikoesoemo memakai taktik kooperatif yaitu dengan bekerjasama pemerintahan Hindia Belanda. Perjuangan Soetardjo Kartohadikoesoemo di forum Dewan Rakyat mencapai puncaknya pada saat diajukannya “Petisi Soetardjo” dengan mengajukan Petisi Soetardjo pada sidang *Volksraad* yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 1936.

Akhirnya pada tanggal 16 November 1938 datanglah keputusan dari Kerajaan Belanda Nomor 40 yang menyatakan bahwa Petisi Soetardjo ditolak oleh Ratu Belanda. Alasan penolakan adalah karena bangsa Indonesia dianggap belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah Indonesia sendiri. Surat keputusan pemerintah kerajaan Belanda tersebut disampaikan kepada sidang *Volksraad* pada tanggal 29 November 1938.

Meskipun mengalami kekecewaan tetapi Penolakan pemerintah terhadap Petisi Soetardjo telah menimbulkan pengaruh terhadap pergerakan nasional Indonesia yang antara lain adalah semakin menumbuhkan rasa solidaritas dan rasa persatuan diantara kaum pergerakan. Rasa persatuan yang semakin besar tersebut kemudian diwujudkan dengan pembentukan GAPI (Gabungan Politik Indonesia) pada tanggal 21 Mei 1939.

Paedagogis, Sifat-sifat positif yang bisa diteladani sebagai makhluk intelek dari sosok Soetardjo Kartohadikoesoemo adalah kecintaanya kepada bangsa dan negaranya, terutama kepada rakyat kecil di pedesaan dan perkotaan, melahirkan semangat perjuangan kearah yang lebih baik. Soetardjo Kartohadikoesoemo senantiasa berjuang hanya demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadinya. Hal ini dapat dibuktikan dari sumber yang menyebutkan bahwa dalam hal cara maupun taktik perjuangan, bangsa Indonesia memang menempuh cara yang berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama yaitu kemerdekaan Indonesia.

Di dalam dunia pendidikan sifat-sifat positif dari sosok Soetardjo Kartohadikoesoemo sudah sepantasnya dapat dicontoh oleh setiap pendidik di negeri ini. diharapkan penulisan ini memberikan inspirasi dalam penanaman sikap dan perilaku Soetardjo, yang masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya generasi muda, mengenai pemikiran tokoh Soetardjo, agar dapat menjadi inspirasi dan fondasi dalam mengisi kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Abdulsyani. 2007. *Sosiologi, Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Badri Yatim. 1999. *Soekarno, Islam, Dan Nasionalisme*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Cahyo Budi Utomo. 1995. *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Dudung Abdurahman. 2007. *Metodelogi Penelitian Sejarah*. Ar Ruzz Media Grup: Jakarta

Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus 3. 1982. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.

Lapian, Dewi Juliati, dkk. 2012. *(Indonesia Dalam Arus Sejarah) Masa Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve atas kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad Ke-20 I, Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati*. Yogyakarta: Kanisius.

Pringgodigdo. 1964. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat.

Ruchiat, Rahamat, dkk. 2012. *Sejarah Gedung Museum Moh. Hoesni Thamrin (Suatu Penelusuran)*. Jakarta: Unit Pengelola Museum Joang 45 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

Sartono Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Setiadi Kartohadikusuma. 1990. *(Soetardjo) Pembuat “Petisi Soetardjo” Dan Perjuangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soerjono Soekanto. 1989. *Sosiologi suara pengantar*, Raja Grafindo persada: Jakarta.

Suhartoyo Hardjosatoto. 1985. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Suatu Analisa Ilmiah*. Yogyakarta: Liberty.

Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudiyo. 2002. *(Pergerakan nasional) mencapai dan mempertahankan kemerdekaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Internet :

Mujiarti, S. 2006. “Pengaruh Petisi Soetardjo 15 Juli 1936 Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia”, (Online), (<https://digilib.uns.ac.id/> diunduh 14 February 2017).

Samita, S. 2012. “Biografi Soetardjo Kartohadikusumo”, (Online), (<https://profil.merdeka.com/> diunduh 20 April 2017).

Rusidy, F. 2015. “Volksraad”, (Online), (<http://www.kompasiana.com> diunduh 7 Juli 2017).